

PANDANGAN FILOSOFIS TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR ANTARA KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENDIDIKAN

Lulie Hana Fairuzy¹, Salsa Bella Anisa², Sendy Annafi Rizqi³, Tika Bilqis Munbaits⁴,
Ahmad Ruslan⁵

^{1,2,3,4,5}PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

¹luliehana0416@gmail.com, ³sendyaaannafi@gmail.com,

⁴tikamunbaits@gmail.com, ⁵ruslan@uhamka.ac.id

ABSTRACT

This article aims to explore the philosophical perspectives on the "Merdeka Belajar" (Independent Learning) policy in the context of freedom and responsibility in education. Using a qualitative approach through literature analysis, this article delves into the philosophical concepts of freedom and responsibility from educational thinkers such as Ki Hadjar Dewantara, Paulo Freire, and John Dewey, while evaluating the implementation of this policy in Indonesia. The results show that the "Merdeka Belajar" policy has had a positive impact on student motivation for independent learning, but still faces challenges in implementation, such as insufficient understanding by teachers and limited infrastructure support. The discussion highlights that the freedom offered in education must be balanced with responsibility from students, teachers, and parents to create an effective learning environment. In conclusion, despite the challenges, this policy holds significant potential to shape a generation of learners who are intelligent, critical, and responsible.

Keywords: merdeka belajar, freedom, responsibility, education

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan filosofis terkait kebijakan "Merdeka Belajar" dalam konteks kebebasan dan tanggung jawab dalam pendidikan. Menggunakan metode kualitatif melalui analisis literatur, artikel ini menggali konsep filosofis kebebasan dan tanggung jawab dari tokoh pendidikan seperti Ki Hadjar Dewantara, Paulo Freire, dan John Dewey serta menilai implementasi kebijakan ini di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan "Merdeka Belajar" membawa dampak positif terhadap motivasi siswa dalam belajar mandiri, tetapi masih menghadapi tantangan implementasi seperti pemahaman guru yang belum optimal dan keterbatasan dukungan infrastruktur. Pembahasan menunjukkan bahwa kebebasan yang diberikan dalam pendidikan harus diimbangi dengan tanggung jawab siswa, guru, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Kesimpulannya, meskipun ada

tantangan, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk membentuk generasi pembelajar yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: merdeka belajar, kebebasan, tanggung jawab, pendidikan

A. Pendahuluan

Kebijakan "Merdeka Belajar," yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, menandai langkah transformasional dalam sistem pendidikan di Indonesia. Reformasi ini bertujuan untuk merespon kebutuhan siswa secara lebih personal, dengan memberi fleksibilitas dan otonomi kepada sekolah dalam pengelolaan pendidikan yang lebih adaptif dan relevan dengan zaman (Syafi'i, 2022). Di tengah tantangan pendidikan yang dihadapi Indonesia, seperti keterbatasan akses, kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, serta kurikulum yang kurang kontekstual, Merdeka Belajar muncul sebagai upaya memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri secara mandiri dan sesuai dengan minat serta bakatnya.

Sebagai salah satu tujuan utama kebijakan ini, peningkatan kualitas pendidikan diharapkan terjadi melalui pendekatan yang

memungkinkan sekolah-sekolah mengembangkan metode pengajaran yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik lokal. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, setidaknya 141.194 sekolah telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk beradaptasi secara lebih fleksibel terhadap kebutuhan siswa. Selain itu, dukungan teknologi berupa aplikasi digital, seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM), telah diakses oleh 1.157.450 tenaga pengajar untuk membantu proses pengajaran yang lebih efisien dan interaktif. Jumlah pengguna platform digital ini bahkan mencapai lebih dari 10 juta pada tahun 2022, menunjukkan antusiasme tinggi dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka (Kemdikbud, 2023).

Secara filosofis, kebijakan "Merdeka Belajar" mengacu pada konsep kebebasan dalam pendidikan

yang berakar pada pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Menurutnya, pendidikan membebaskan siswa dari keterkungkungan sistem yang kaku dan tidak adaptif terhadap potensi individu. Kebebasan di sini dimaknai sebagai hak dan peluang bagi siswa untuk menentukan jalur pendidikan yang sesuai dengan dirinya, sambil tetap disertai dengan tanggung jawab untuk belajar dengan sungguh-sungguh (Pangestu & Rochmat, 2021). Filosof pendidikan lainnya, seperti Paulo Freire dan John Dewey, juga memberikan pandangan penting tentang peran kebebasan dalam proses belajar yang otentik dan kreatif. Freire, misalnya, menekankan pentingnya dialog kritis dalam pendidikan yang memungkinkan siswa berperan aktif dalam pembelajaran, sementara Dewey melihat kebebasan sebagai landasan penting untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kemandirian individu (Nanggalaupi & Suryadi, 2021).

Namun, implementasi kebebasan dalam pendidikan juga menghadirkan tantangan, khususnya terkait keseimbangan dengan tanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, kebebasan yang

diberikan harus didukung oleh pemahaman bahwa setiap siswa memiliki kewajiban untuk memanfaatkan kebebasan itu secara produktif. Data survei persepsi dari siswa dan guru menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa lebih berdaya dan termotivasi dengan adanya pilihan dalam jalur pendidikan yang sesuai dengan minat mereka. Namun, di sisi lain, para guru menghadapi tantangan dalam membimbing siswa untuk memahami batas-batas kebebasan mereka serta membangun sikap disiplin dalam proses pembelajaran yang lebih fleksibel ini. Tanpa panduan yang jelas, kebebasan ini berisiko disalahartikan dan disalahgunakan oleh siswa, yang justru akan menghambat pencapaian tujuan pembelajaran.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan filosofis terkait kebijakan "Merdeka Belajar" dalam kerangka kebebasan dan tanggung jawab. Dengan memahami esensi dari kebebasan yang bertanggung jawab, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana kebijakan ini dapat dioptimalkan sehingga menghasilkan generasi

pembelajar yang tidak hanya cerdas dan kreatif, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan etika yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur untuk menggali pandangan filosofis terhadap kebijakan "Merdeka Belajar" dalam kaitannya dengan konsep kebebasan dan tanggung jawab dalam pendidikan. Metode ini dipilih karena analisis literatur memungkinkan penulis mengeksplorasi dan memahami konsep-konsep mendasar dalam pendidikan dari sudut pandang teori dan filosofi yang telah ada, serta menilai bagaimana kebijakan pendidikan terkini di Indonesia mencerminkan atau berbeda dari pandangan para filsuf pendidikan. Sumber-sumber literatur yang digunakan mencakup buku-buku dan karya tokoh pendidikan, jurnal ilmiah, artikel akademis, serta laporan dan publikasi kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Tinjauan literatur ini diharapkan dapat memberikan landasan teoretis yang kuat bagi analisis artikel, terutama

dalam menelusuri esensi dari "Merdeka Belajar" sebagai kebijakan yang bertujuan untuk membebaskan dan memberdayakan siswa.

Kajian literatur difokuskan pada pemikiran para tokoh pendidikan seperti Ki Hadjar Dewantara, Paulo Freire, dan John Dewey, yang masing-masing memberikan pandangan unik tentang kebebasan dalam konteks pendidikan. Ki Hadjar Dewantara menekankan pentingnya kemerdekaan dalam belajar yang memungkinkan siswa berkembang sesuai potensi alamiah mereka, sementara Paulo Freire memperkenalkan konsep "pendidikan pembebasan" yang mendorong siswa untuk aktif berpikir kritis dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. John Dewey, di sisi lain, melihat kebebasan sebagai dasar bagi perkembangan intelektual dan sosial siswa, di mana kebebasan ini harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Literatur ini dipilih karena relevansinya dengan ide dasar "Merdeka Belajar," yang memberi ruang bagi siswa dan guru untuk terlibat secara lebih mandiri dan kreatif dalam proses belajar-mengajar. Analisis terhadap pandangan tokoh-tokoh ini

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip kebebasan yang bertanggung jawab dalam pendidikan, dan bagaimana prinsip tersebut tercermin dalam kebijakan ini. Selain pemikiran filsafat pendidikan, artikel ini juga mengkaji data empiris dari laporan kebijakan dan survei terkait pelaksanaan "Merdeka Belajar" di lapangan. Data ini mencakup hasil survei persepsi siswa dan guru mengenai kebijakan "Merdeka Belajar," partisipasi sekolah dalam implementasi kurikulum baru, serta laporan mengenai penggunaan teknologi dalam mendukung pembelajaran. Data sekunder ini digunakan untuk memahami tantangan dan dampak nyata dari kebijakan "Merdeka Belajar" dalam konteks sekolah-sekolah di Indonesia. Melalui penggabungan analisis filosofis dan data empiris, artikel ini diharapkan mampu memberikan evaluasi yang komprehensif terhadap kebijakan "Merdeka Belajar," serta menawarkan pandangan yang lebih holistik mengenai pentingnya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam pendidikan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Kebijakan "Merdeka Belajar" di Indonesia:

Implementasi kebijakan "Merdeka Belajar" di Indonesia membawa perubahan mendasar dalam pendekatan pendidikan dengan menawarkan kebebasan lebih bagi siswa dan penyederhanaan prosedur administratif bagi guru. Kebijakan ini, yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada ujian nasional sebagai tolok ukur utama prestasi siswa dan berfokus pada kompetensi dasar, seperti literasi dan numerasi, melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Selain itu, "Merdeka Belajar" juga memperkenalkan prinsip-prinsip yang memberikan fleksibilitas dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta kebijakan zonasi sekolah yang dirancang untuk meratakan akses pendidikan di berbagai wilayah (Handayani et al., 2023). Melalui kebijakan ini, siswa memiliki lebih banyak ruang untuk mengembangkan kreativitas dan mandiri, sementara guru didorong sebagai fasilitator daripada sekadar pemberi materi.

Beberapa studi menunjukkan bahwa "Merdeka Belajar" telah membawa dampak positif di sekolah-sekolah yang telah menerapkan pendekatan ini. Dengan kebebasan yang lebih besar untuk memilih jalur pembelajaran sesuai minat mereka, siswa menunjukkan partisipasi aktif yang lebih tinggi dalam kegiatan belajar, terutama ketika didukung oleh penggunaan teknologi dan media pembelajaran yang variatif. Studi kasus di beberapa sekolah menunjukkan bahwa siswa yang dilibatkan dalam proses pembelajaran melalui pemilihan materi dan metode belajar tertentu cenderung lebih termotivasi dan menunjukkan peningkatan dalam pemahaman konseptual serta keterampilan berpikir kritis. Pada saat yang sama, penyederhanaan RPP memungkinkan guru untuk fokus pada pengajaran yang lebih efektif, mengurangi beban administratif yang sering kali mengganggu waktu mereka dalam mengembangkan proses pembelajaran kreatif (Sulistyo et al., 2022).

Namun, meskipun manfaatnya mulai terlihat, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, banyak guru

belum memahami sepenuhnya filosofi dan pendekatan "Merdeka Belajar" dan kesulitan dalam menerjemahkannya ke dalam praktik. Dengan latar belakang metode pembelajaran konvensional, peralihan ke metode yang lebih berpusat pada siswa memerlukan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut bagi para guru. Hal ini sering kali diperburuk oleh minimnya dukungan dan akses terhadap sumber daya pelatihan yang memadai. Kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti keterbatasan akses teknologi dan sumber daya belajar, terutama di daerah-daerah terpencil, juga menjadi hambatan besar dalam mendukung kreativitas dan kemandirian siswa, sehingga perlu adanya alokasi anggaran yang lebih besar dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, kebijakan ini juga masih dibayangi oleh beban administratif yang berat bagi guru. Meski ada penyederhanaan RPP, banyak guru tetap terjebak dalam tugas-tugas administratif yang menghabiskan waktu dan tenaga, sehingga menyulitkan mereka untuk fokus penuh pada proses pembelajaran.

Tantangan lain muncul dari kebiasaan lama di mana guru terbiasa memegang kendali penuh dalam pembelajaran. Peralihan dari model tradisional ke metode yang lebih terbuka dan berbasis partisipasi siswa menuntut adaptasi yang tidak mudah, sehingga beberapa guru masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan gaya mengajar mereka (Sulistyo et al., 2022).

Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat dalam mendukung kebijakan ini. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep "Merdeka Belajar" dapat menghambat implementasi kebijakan ini, karena keberhasilan transformasi pendidikan membutuhkan kolaborasi erat antara sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dukungan orang tua menjadi penting untuk membantu siswa mengelola kebebasan belajar mereka, serta untuk mendorong anak dalam mencapai target pendidikan. Oleh karena itu, sosialisasi yang intensif kepada masyarakat sangat diperlukan untuk membangun dukungan yang konstruktif bagi implementasi kebijakan ini.

Secara keseluruhan, implementasi "Merdeka Belajar" di Indonesia menunjukkan langkah awal yang positif dalam transformasi pendidikan yang berfokus pada kebebasan dan kemandirian siswa. Namun, tantangan struktural dan kultural memerlukan upaya terus-menerus dari seluruh pemangku kepentingan agar tujuan "Merdeka Belajar" dapat tercapai secara efektif. Pelatihan bagi guru, dukungan infrastruktur, serta kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat adalah langkah-langkah penting yang perlu dioptimalkan demi terciptanya lingkungan pendidikan yang merdeka, bertanggung jawab, dan berdaya saing.

Analisis Filosofis tentang Kebebasan dalam Pendidikan:

Dalam pendidikan, konsep kebebasan memiliki peran fundamental sebagai fondasi bagi terciptanya pembelajaran yang mandiri dan berorientasi pada pengembangan kritis siswa. Kebebasan dalam pendidikan dapat diartikan sebagai hak siswa untuk mengatur proses belajar mereka sendiri, memilih materi yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, serta menentukan metode

belajar yang efektif. Kebijakan "Merdeka Belajar," yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, mencoba menerapkan konsep ini dengan memberikan lebih banyak ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi bakat dan minatnya (Rahmadayanti & Hartoyo, 2022). Dengan cara ini, siswa diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi pasif tetapi mampu berperan aktif dalam mengarahkan proses belajarnya. Menurut data yang tersedia, kebijakan ini juga dirancang agar siswa bisa memanfaatkan kebebasan dalam memilih materi pembelajaran, menentukan metode, serta melakukan evaluasi mandiri untuk mengukur pencapaian mereka. Hal ini penting agar pendidikan tidak lagi berpusat pada guru semata, tetapi mengutamakan partisipasi aktif siswa sebagai subjek utama dalam proses pendidikan mereka (Mones et al., 2022).

Filsuf pendidikan progresivisme John Dewey menganggap bahwa pendidikan harus memberi siswa kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait proses belajarnya, yang juga dikenal

sebagai kebebasan akademik. Ia berpendapat bahwa keterlibatan langsung dalam pembelajaran menciptakan pengalaman bermakna, yang memperkaya pemahaman kritis siswa terhadap pengetahuan yang mereka peroleh. Menurut Dewey, kebebasan ini tidak hanya mendukung pengembangan akademik tetapi juga membangun karakter demokratis, karena siswa dibiasakan untuk bertanggung jawab atas keputusan dan rencana belajar mereka. Dalam pandangannya, pendidikan yang memberi ruang bagi kebebasan berpikir dan bertindak juga akan mendorong siswa untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, serta mampu memecahkan masalah yang mereka temui. Dewey percaya bahwa tanpa kebebasan, pendidikan hanya akan mencetak individu-individu yang cenderung pasif dan tidak mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks (Mustaghfiroh, 2020).

Sebagai pendidik dan filsuf pendidikan, Paulo Freire mengusulkan konsep "pendidikan pembebasan" yang memiliki prinsip kebebasan sebagai elemen penting dalam menumbuhkan kesadaran kritis dan kemandirian siswa. Dalam

bukunya *Pedagogy of the Oppressed*, Freire menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi sebagai alat pembebasan yang memungkinkan siswa berpikir kritis terhadap realitas di sekitar mereka. Dalam pandangan Freire, pendidikan bukanlah sekadar proses mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan sebuah dialog aktif di mana siswa dan guru bersama-sama membangun pemahaman melalui diskusi dan eksplorasi ide. Ia mengkritik metode "pendidikan bankir" yang otoriter, di mana siswa hanya dianggap sebagai objek pasif penerima informasi. Freire percaya bahwa sistem pendidikan semacam ini menghalangi siswa untuk mengembangkan pandangan yang kritis dan mandiri. Oleh karena itu, ia berargumen bahwa kebebasan untuk berekspresi dan mengeksplorasi adalah hak dasar siswa agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang berpikir mandiri dan mampu berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil (Aisyah et al., 2022).

Namun, kebebasan dalam pendidikan ini tidak lepas dari tantangan. Dalam implementasi kebijakan "Merdeka Belajar," kebebasan yang diberikan kepada

siswa juga harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab, baik dari siswa itu sendiri maupun dari para pendidik. Tanpa batasan dan panduan yang jelas, kebebasan dalam pendidikan bisa menjadi kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan kebingungan atau bahkan perilaku negatif. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini memberi keleluasaan bagi siswa untuk mengeksplorasi, peran guru sebagai fasilitator dan mentor tetap esensial untuk memberikan panduan yang bijak. Kebebasan tanpa pengawasan yang baik bisa menimbulkan ketidakdisiplinan, dan sebaliknya, pembatasan yang terlalu ketat juga dapat menghambat pengembangan potensi siswa. Maka, kebebasan dalam pendidikan harus dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, yang bertujuan untuk mendorong siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang kuat, disiplin, dan mampu berkontribusi positif bagi lingkungannya.

**Analisis Filosofis tentang
Tanggung Jawab dalam
Pendidikan**

Tanggung jawab merupakan elemen krusial dalam pendidikan yang memastikan kebebasan belajar dapat diakses dengan bijak oleh siswa dan diarahkan ke tujuan yang tepat. Dalam kebijakan "Merdeka Belajar," tanggung jawab tidak hanya terletak pada siswa tetapi juga pada guru dan orang tua, yang masing-masing berperan untuk memastikan bahwa kebebasan yang diberikan tidak menjadi kebablasan. Peran ini meliputi kemampuan guru sebagai fasilitator, keterlibatan siswa dalam belajar mandiri, serta dukungan orang tua di rumah. Ketiganya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana kebebasan digunakan secara produktif demi kemajuan pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan yang lebih bermakna (Muslim, 2023).

Guru, dalam konteks "Merdeka Belajar," memegang tanggung jawab utama sebagai fasilitator yang menciptakan suasana pembelajaran aktif. Dengan pendekatan yang berpusat pada siswa, guru memberikan keleluasaan dalam

memilih materi, namun dengan tetap memberikan arahan dan bimbingan. Guru yang memahami karakteristik, kebutuhan, dan tujuan belajar siswa dapat membangun lingkungan yang mendukung eksplorasi siswa dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan dan disiplin. Selain itu, tanggung jawab guru juga terletak pada penerapan kurikulum yang adaptif dan relevan, di mana kebebasan siswa untuk mengelola belajarnya didukung oleh sistem evaluasi yang objektif dan adil. Dengan adanya panduan dan pengawasan dari guru, siswa memiliki ruang untuk bertumbuh tanpa kehilangan arah, memastikan bahwa kebebasan tersebut menjadi landasan yang kokoh untuk pengembangan potensi diri mereka.

Orang tua, sebagai pendamping di luar lingkungan sekolah, juga memiliki tanggung jawab penting untuk mendukung pendidikan anak mereka di rumah. Peran orang tua tidak hanya dalam hal penyediaan sumber daya dan dukungan materi, tetapi juga sebagai pemberi motivasi dan pengawas dalam proses belajar anak. Orang tua yang berkomunikasi dengan baik dengan guru dapat membantu

memantau perkembangan anak dan memberikan dukungan yang diperlukan. Mereka berperan sebagai motivator yang menjaga semangat anak dalam belajar, dan juga sebagai pengawas untuk memastikan kebebasan yang diberikan tidak disalahgunakan. Dalam konteks "Merdeka Belajar," keterlibatan orang tua menjadi sangat penting untuk membantu siswa memahami batasan-batasan dalam kebebasan tersebut serta untuk mendorong mereka tetap bertanggung jawab dalam mengejar tujuan pendidikan mereka (Rubingah et al., 2023).

Di sisi lain, siswa juga dituntut untuk bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Siswa perlu mengembangkan kemandirian dalam menentukan tujuan belajar, memilih cara belajar yang efektif, dan mengevaluasi kemajuan yang dicapai. Dalam kebijakan "Merdeka Belajar," siswa diarahkan untuk mengambil peran aktif sebagai aktor utama dalam pendidikan mereka. Ini tidak hanya mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif, tetapi juga untuk mengelola waktu dan upaya belajar dengan baik. Dengan tanggung jawab yang dibebankan pada diri sendiri, siswa menjadi lebih

sadar akan konsekuensi dari setiap keputusan yang mereka ambil dalam proses belajar, sehingga kebebasan ini dapat dikelola dengan bijak.

Dengan tanggung jawab yang jelas di antara guru, orang tua, dan siswa, kebijakan "Merdeka Belajar" berpotensi mencapai tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang mandiri, kritis, dan bertanggung jawab. Ketika setiap pemangku kepentingan memahami peran mereka dan bekerja sama, kebebasan dalam pendidikan dapat berjalan selaras dengan disiplin dan pengembangan karakter.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya, kebijakan "Merdeka Belajar" di Indonesia menawarkan perubahan mendasar dalam pendidikan dengan memberikan siswa kebebasan lebih besar dalam proses belajar mereka. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada penilaian formal seperti ujian nasional, memberi ruang kepada siswa untuk mengembangkan kompetensi dasar, kreativitas, dan kemandirian. Dengan dukungan teknologi dan metode pembelajaran variatif, kebijakan ini telah menunjukkan dampak positif

terhadap motivasi dan partisipasi aktif siswa. Namun, implementasinya menghadapi tantangan struktural, termasuk pemahaman guru yang masih terbatas, kekurangan sumber daya, dan kurangnya dukungan dari masyarakat.

Secara filosofis, kebebasan yang ditawarkan dalam "Merdeka Belajar" harus diiringi dengan tanggung jawab yang seimbang dari semua pihak: guru sebagai fasilitator, orang tua sebagai pendamping, dan siswa sebagai subjek utama pendidikan. Kebebasan tanpa tanggung jawab dapat menjadi kontraproduktif, sehingga penting untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya bebas berekspresi, tetapi juga mampu mengelola kebebasan tersebut secara bijaksana. Jika diterapkan dengan baik, kebijakan ini berpotensi menciptakan generasi mandiri, kritis, dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip pendidikan membangun karakter demokratis dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, L., Rizqiqa, F. N. R., Putri, F. D., Nulhaq, S., & others. (2022). Kurikulum merdeka dalam perspektif pemikiran pendidikan Paulo Freire. *At-Ta'lim: Jurnal*

Pendidikan, 8(2), 162–172.

Handayani, F., Hasyim, D. M., Suryono, W., Sutrisno, S., & Novita, R. (2023). Peran teknologi pendidikan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kurikulum merdeka belajar di perguruan tinggi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 1265–1271.

Kemdikbud. (2023). *Empat Aspek Prioritas dalam Gerakan Merdeka Belajar Menginspirasi Negara-negara di ASEAN*. Kemdikbud.Go.Id.

Mones, A. Y., Masitoh, S., & Nursalim, M. (2022). Merdeka Belajar: Sebuah Legitimasi Terhadap Kebebasan Dan Transformasi Pendidikan (Sebuah Tinjauan Pedagogi Kritis Menurut Paulo Freire). *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 8(2), 302–311.

Muslim, A. (2023). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 34–40.

Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep "merdeka belajar" perspektif aliran progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141–147.

Nanggalaupi, A., & Suryadi, K. (2021). Kampus Merdeka Dalam Perspektif Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dan Paulo Freire Serta Perdebatan Pemikiran Aliran Filsafat Pendidikan John Dewey Vs Robert M. Hutchins.

- JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2).
- Pangestu, D. A., & Rochmat, S. (2021). Filosofi merdeka belajar berdasarkan perspektif pendiri bangsa. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 78–92.
- Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. (2022). Potret kurikulum merdeka, wujud merdeka belajar di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7174–7187.
- Rubingah, N., Indriasari, P. S., Fauziati, E., & Indri, I. (2023). Kurikulum Merdeka dalam Pandangan Filsafat Esensialisme. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(1), 136–147.
- Sulistyo, T., Liskinasih, A., & Purnawati, M. (2022). MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA: Tantangan Atau Hambatan Ditinjau Dari Tuntutan Pembelajaran Abad 21? *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3).
- Syafi'i, F. F. (2022). Merdeka belajar: sekolah penggerak. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*.